

ABSTRAK

Dalam kasus layanan aplikasi pinjaman *online*, banyak dari masyarakat yang resah dan mengeluh dengan layanan yang di berikan karena adanya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan pihak jasa layanan tersebut tanpa adanya pemberitahuan atau izin dari pemilik data. Terkait dengan kasus yang terjadi maka hal ini menjadi penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa layanan pinjaman *online* berikut sanksi-sanksinya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa pinjaman *online*. Jenis penelitian yang di gunakan merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni menelaah, mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Untuk bahan hukum yang digunakan, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari skripsi, disertasi, jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menganalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan hukum yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul sebagai penunjang penyelesaian masalah.

Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi telah di atur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan perubahan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus perlindungan terhadap data pribadi pengguna jasa layanan telah di atur di dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, ditegaskan pada pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keteserdiaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh izin dari pemilik data pribadi kecuali di tentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sanksinya mengacu pada pasal 47 ayat (1) yaitu, sanksi administrative berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, serta pencabutan izin, tetapi ini hanya berlaku bagi layanan jasa yang terdaftar dalam OJK, sedangkan kasus yang banyak terjadi dilakukan oleh layanan yang tidak terdaftar dan tidak menjamin juga jika yang terdaftar di OJK melakukan tindak kejahatan terhadap data pribadi pengguna jasa layanan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman *Online*

ABSTRACT

In the case of online loan application services, many people are anxious and complaining about the services provided because of the misuse of personal data by these services without notification or permission from the data owner. Regarding the cases that occur, it is important to study the legal protection of the personal data of online loan services users and the sanctions. The purpose of this paper is to examine the legal protection of the personal data of online loan services users. The type of research used normative juridical research using a statutory approach, namely examining, examining laws, and regulations related to legal issues. For the legal materials, the writer used primary legal materials of law and secondary legal materials derived from thesis, dissertation, journal, and so forth. While to analyze using a descriptive analysis method that describes in advance the legal or legal issues and processes the collected legal material as a basis for problem solving.

Sanctions for breaches of personal data have been regulated in Law No. 11 of 2008 and changes to Information and Electronic Transactions, but specifically the protection of personal data of service users has been regulated in OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016, emphasized in article 26 that the organizer is responsible for maintaining confidentiality, integrity, and the availability of the users' personal data and its use must obtain permission from the owner of the personal data unless otherwise stipulated by the provisions of laws and regulations. While the sanctions refer to article 47 paragraph (1), namely, administrative sanctions in the form of written warnings, fines, obligations to pay a certain amount of money, restrictions on business activities, and revocation of licenses, but this only applies to services registered in the OJK, while cases involving many cases are carried out by unregistered services and do not guarantee that those registered with the OJK commit crimes against personal data of service users.

Key : Legal Protection, Personal Data, Online Loan Service

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Keaslian	5
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Pendekatan Penelitian	7
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, DATA PRIBADI, DAN PINJAMAN <i>ONLINE</i>	10

2.1	Perlindungan Hukum	10
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.2	Data Pribadi	14
2.2.1	Pengertian Data Pribadi	14
2.3	Pinjaman Online	16
2.3.1	Pengertian Pinjaman Online	16
BAB III PEMBAHASAN		19
3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	19
3.1.1	Sanksi Pelanggaran Data Pribadi	28
3.2	Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	32
3.3	Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibutuhkan Indonesia Untuk Mengatur Perlindungan Data Pribadi Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	35
BAB IV PENUTUP		50
4.1	Kesimpulan	50
4.2	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....		52